

Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Melalui Pendidikan Demokrasi

Muhammad Dimas Alfarisyi

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi, Jambi

Email: dhimasalfarisyi33@gmail.com

Nashrulloh Al Hasani

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi, Jambi

Email: anasalhasani957@gmail.com

Siti Tiara Maulia

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi, Jambi

Email: sititiaramaulia@unja.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas pentingnya partisipasi yang tinggi dalam proses demokrasi, terutama dalam acara berskala besar seperti pemilihan umum, untuk memastikan bahwa warga negara memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin mereka berdasarkan hati nurani. Namun, partisipasi yang rendah, seperti "golput" atau yang disebut sebagai golongan putih, dapat menjadi ancaman bagi demokrasi dan mengurangi esensinya. Dalam artikel ini, penulis menggunakan teknik studi literatur. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data-data yang berasal dari buku, skripsi, jurnal, dan berita. Salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada pemilu adalah minimnya tingkat pemahaman atau pendidikan masyarakat tentang pemilu. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk mengatasi hal tersebut dengan menerapkan pendidikan demokrasi bagi warga negara. Dengan adanya pendidikan demokrasi di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat agar nantinya dapat melahirkan calon pemimpin yang berkualitas.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilu, Pendidikan Demokrasi

Abstract

This article examines the importance of high participation in democratic processes, especially in large-scale events such as elections, to ensure that citizens have the freedom to choose their leaders based on conscience. However, low participation, such as "abstentions" or so-called white groups, can be a threat to democracy and reduce its essence. In this article, the writer uses literature study technique. The data used is secondary data, namely data from books, theses, journals, and news. One of the factors that influence people's political participation in elections is the lack of public understanding or education about elections. Therefore, an effort is needed to overcome this by implementing democratic education for citizens. With the existence of democracy education in Indonesia, it is hoped that it can improve the quality of people's political participation so that later they can produce quality prospective leaders.

Keywords: *Political Participation, Elections, Democracy Education.*

PENDAHULUAN

Negara demokrasi seharusnya memiliki partisipasi politik yang tinggi. Khususnya pada penyelenggaraan pemilu yang disebut sebagai pesta demokrasi. Penyelenggaraan pemilu menjadi bukti bahwa negara telah menyediakan ruang kebebasan bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin mana yang layak sesuai hati nuraninya (Saputra, 2020). Indonesia sebagai salah satu negara yang berpegang pada paham demokrasi seharusnya dapat memaksimalkan partisipasi politik masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dengan jumlah penduduk kurang lebih 250 juta jiwa memerlukan upaya yang optimal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Golput pada hakikatnya merupakan kerugian bagi demokrasi. Mengapa demikian, kehadiran golput atau yang sering disebut sebagai golongan putih ini dapat mengancam status demokrasi di suatu negara, dan dapat menurunkan esensi dari demokrasi, seperti halnya di Indonesia yang memiliki catatan sejarah yang cukup Panjang. Jika diulas secara seksama, Indonesia telah beberapa kali menyelenggarakan pemilu mulai tahun 1955 sampai tahun 2019, namun masyarakat cenderung tidak menggunakan suaranya dengan utuh atau mengoptimalkan hak pilihnya, bahkan hal ini kian meningkat setiap kali pelaksanaan pemilu (Saputra, 2020).

Partisipasi politik tidak hanya memberikan ruang pada untuk memberikan suaranya pada proses pemilihan umum, akan tetapi perwujudan nyata dalam dalam pengambilan keputusan. Dilihat pandang dari sudut pandang pemerintah, partisipasi politik berkaitan dengan cara mengkoordinir pengambilan kebijakan dengan mengoptimalkan hak dan kewajiban warga negara. Jika partisipasi masyarakat pada proses pemilu tergolong rendah, ini akan menjadi masalah yang serius. Banyak pihak yang terkena imbasnya, baik organisasi penyelenggara pemilu, pemerintah, maupun pihak lainnya.

Ada beberapa alasan mengapa masyarakat cenderung pasif dalam berpartisipasi pada pemilu, yaitu tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik yang rendah, tingginya politik "imbal jasa" yaitu masyarakat akan memberikan hak pilihnya jika diberi sebuah imbalan, dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai politik (Husna & Fahrimal, 2021). Partisipasi masyarakat yang rendah dalam penyelenggaraan pemilu dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman atas pentingnya proses demokrasi melalui pemilu. Mereka cenderung berumpama bahwa yang mengatur sistem itu adalah pemerintah dan bukan menjadi urusan

mereka. Ketika seorang pemimpin telah terpilih lalu performanya tidak sesuai dengan ekpektasi mereka, pada akhirnya timbullah perasaan kecewa akibat realitas yang dirasakan yang kemudian melahirkan perilaku sikap apatis politik. (Husna & Fahrimal, 2021)

Salah satu upaya untuk meingkatkan partisipasi adalah melalui pendidikan demokrasi. Zamroni mengatakan bahwa pendidikan demokrasi diharapkan mampu membentuk generasi demokratis yang memegang teguh nilai inklusivitas dan bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat. Pada dasarnya, Pendidikan demokrasi merupakan internalisasi *values* demokrasi agar dapat diimplementasikan dengan tepat oleh warga negara (Muhammad Sobri, 2022).

Pendidikan demokratis adalah Pendidikan yang memiliki tujuan untuk membentuk masyarakat demokratis, yakni masyarakat yang memiliki pemahaman, penghargaan, dan upaya pelaksanaan demokrasi dalam kehidupannya. Pendidikan demokrasi juga berfungsi untuk membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan nasional. Selain itu, pendidikan demokrasi juga berfungsi sebagai pembentuk karakter dan sikap kritis serta toleran terhadap perbedaan dan keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat. (Nur & Sudarsono, 2019).

METODE PENELITIAN

Data merupakan hasil olah informasi untuk memberikan manfaat dan memberikan *values* bagi pengguna data untuk mengambil keputusan. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang berguna bagi penerimanya dan memiliki nilai bagi pengambilan keputusan saat ini atau dimasa yang akan datang (Fairuzabdi, 2021). Informasi tidak hanya dianggap sebagai sarana pengetahuan, tetapi berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Bahkan manusia sangat memerlukan informasi sebelum mereka mengambil keputusan agar tepat dan sesuai yang diharapkan. Informasi ini tersebar banyak sekali, dan dapat ditemukan darimana saja, seperti dari buku, internet, sekolah, lingkungan, bahkan tempat di sekitar kita. Di dalam penelitian, Teknik pengumpulan data memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah penelitian itu. Penggunaan teknik pengumpulan data yang tepat dapat membantu peneliti memperoleh data valid dan relevan.

Dalam artikel ini, metode yang digunakan ialah *literature review*. *Literature review* adalah metode yang digunakan dengan membaca, memilah, dan mengolah data Pustaka (Fadli, 2021). Data sekunder digunakan dalam metode penelitian ini, yakni data yang didapat

melalui buku-buku, jurnal, skripsi maupun berita. Setelah data-data tadi dikumpulkan, lalu akan ditinjau lebih lanjut agar dapat disusun Kembali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah memasuki masa orde baru, sistem pemilihan di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Pemilu atau pemilihan umum adalah pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh negara sebagai ruang bagi masyarakatnya untuk dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria ataupun kehendaknya. Berdasarkan Undang-Undang No. 08 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilu merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan aturan yang berlaku (Indonesia, 2012).

Secara teori, pemilu merupakan Langkah awal dari beberapa uraian pengelolaan negara demokrasi. Oleh karena itu, pemilu sering dianggap sebagai salah satu kegiatan yang bertanggungjawab atas implementasi sistem politik di Indonesia. Proses ini melibatkan warga negara secara langsung. Dengan adanya pemilu ini, rakyat dapat mengemukakan aspirasinya dalam dunia politik. Pemilu ini memiliki lima tujuan dilihat dari pelaksanaannya, yaitu:

1. Pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Sesuai dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, artinya kedaulatan itu terletak di tangan rakyat. Dengan adanya pemilu, rakyat bisa menentukan wakil-wakilnya, yang nantinya para wakil tersebut juga akan menampung aspirasi rakyat dan menentukan siapa yang layak memegang sistem pemerintahan.
2. Pemilu merupakan landasan pembentukan struktur politik formal. Jika penyelenggaraannya berkualitas akan berpengaruh positif terhadap kualitas lembaga politik formal.
3. Pemilu merupakan metode restrukturisasi pemimpin yang dilakukan secara konstitusional.
4. Pemilu merupakan bentuk legitimasi bagi pemimpin politik sebagai cara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk memberikan aspirasinya. Penyelenggaraan pemilu memastikan masyarakat dapat memilih pemimpin secara

langsung sehingga dapat meminta pertanggungjawaban atas realisasi janji politiknya. Sesuai dengan UUD 1945, pemilu dilakukan untuk mendirikan pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan demokratis.

Keterlibatan aktif individu dalam berbagai aspek baik fisik dan non-fisik untuk berkontribusi dalam kegiatan dalam mencapai tujuan (Adi, 2013). Menurut Michael Rush dan Philip Althoft, partisipasi politik merupakan aktivitas masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pemilihan pemimpin, pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Semua aktivitas masyarakat dan kontribusinya dalam tata kelola kebijakan adalah bentuk dari partisipasi politik (Arniti, 2020). Kesadaran politik berhubungan dengan kepercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam politik sadar akan kedudukan dan komitmennya atas pilihan yang telah ditentukan. Partisipasi politik menunjukkan sistem *controlling* mandiri dari masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mengukur partisipasi masyarakat, dapat diamati dari perilaku politik yang ditunjukkan, salah satunya adalah antusiasme dalam mengikuti tahapan pemli bagi para pemilih. Jika dilihat dari bentuknya partisipasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni partisipasi langsung dan tidak langsung. Parfit berpendapat bahwa partisipasi pada dapat didefinisikan sebagai support warga negara dalam pembangunan berdasarkan motivasi yang kuat untuk berkontribusi secara langsung dan tidak langsung sekaligus memikul peranan penting dalam pembangunan. Dengan demikian, partisipasi politik sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan pemilu, jika kualitas partisipasi politik rendah, maka akan berdampak pada keberlangsungan pemilu tersebut. Begitupun sebaliknya. Jika kualitas partisipasi politik masyarakat tinggi, maka dapat melahirkan calon pemimpin yang baik pula.

Kurangnya wawasan terkait dengan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban sebagai warga negara serta minimnya wawasan mengenai pemilu dan demokrasi menjadi faktor penyebab partisipasi politik yang rendah. Imam Prasetya menyebutkan bahwa:

“Tingkat partisipasi seseorang dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah pendidikan. Orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi akan mempunyai wawasan dan pengetahuan yang lebih tinggi pula daripada orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Sehingga partisipasi diberikan oleh orang yang berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih besar daripada orang yang berpendidikan rendah.”

Pengamat politik dari Universitas Widya Mandira Kupang, Urbanus Hurek, mengemukakan mengenai penyebab partisipasi politik masyarakat yang rendah dalam pemilu.

1. Figur calon pemimpin yang maju pada pemilu kurang berkenan di hati masyarakat.
2. Pemilih jenuh dengan agenda rutin pemilu yang dirasa tidak membawa dampak berarti bagi pemilih.
3. Pemilu tidak dimaknai sebagai proses penting dalam kehidupan bernegara.

Jika dibiarkan lebih lanjut, maka dapat melunturkan nilai dari pemilu dan demokrasi itu. Dan juga rendahnya partisipasi politik menyebabkan kualitas calon pemimpin yang tidak sesuai yang akibatnya tingkat pemerintahan menjadi tidak beraturan dan aspirasi yang diminta rakyat pun tidak terpenuhi dengan maksimal. Untuk mengantisipasi rendahnya partisipasi politik masyarakat, diperlukan adanya upaya yang dapat meningkatkan tingkat partisipasi untuk penyelenggaraan pemilu dan kegiatan pemerintahan yang berkualitas. Salah satunya adalah melalui pendidikan demokrasi.

Winataputra dan Budimansyah mengemukakan bahwa Pendidikan demokrasi baik Pendidikan secara formal (pembelajaran di sekolah), non formal (pendidikan di luar sekolah), dan informal (melalui relasi keluarga dan lingkungan) memiliki pandangan sebagai wadah substantif, pedagogis, dan sosio-kultural untuk membentuk values, konsep, prinsip, cita-cita, dan kapabilitas demokrasi melalui berbagai konteks pengalaman. Sedangkan Zamroni mendefinisikan pendidikan demokrasi lebih khusus, yaitu pendidikan demokrasi sebagai cara memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang praktik demokrasi baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat untuk menuntun peserta didik dalam mengenal dan meningkatkan efektifitas partisipasi mereka dalam sistem politik.

Secara esensial, pendidikan demokrasi memiliki tujuan untuk membangun budaya politik baru yang lebih demokratis. Namun perlu dipahami bahwa demokrasi bukan hanya impelmentasi trias politica, namun penyelenggaraan kehidupan bernegara yang lebih inklusif dan terbuka melalui pendidikan politik untuk mengupayakan penerapan nilai demokrasi yang lebih kondusif. Pendidikan demokrasi seharusnya memiliki pembaruan untuk pembangunan demokrasi itu sendiri (Pusposari, 2017). Upaya terbaik untuk menyelenggarakan pendidikan demokrasi perlu dijalankan oleh seluruh pihak sehingga membentuk budaya demokrasi yang lebih dinamis dan dipenuhi kontribusi dari masyarakat.

Pendidikan demokrasi memberikan ketrampilan kepada siswa dan warga negara secara umum untuk menjalankan demokrasi melalui sosialisasi politik yang aktif. Selain konsep demokrasi, pendidikan demokrasi perlu memberikan pemahaman tentang praktik demokrasi yang ideal. Pada tataran konsep, demokrasi memaknai sikap dan perilaku yang

demokratis, sedangkan pada tataran praksis dimaknai sebagai penyelenggaraan demokrasi sebagai sebuah sistem.

Perlu adanya komitmen dari guru, *stakeholders* pendidikan demokrasi, tokoh masyarakat, elit politik, dan masyarakat secara umum untuk mengefektifkan sosialisasi politik. Pendidikan demokrasi juga perlu mencermati nilai-nilai holistik maupun universal. Pendidikan demokrasi dikatakan efektif jika memiliki luaran (peserta didik) yang kompeten secara personal dan sosial dalam demokratisasi dinamis dan berdampak pada *outcome* pendidikan demokrasi, yakni *good citizen*. Penyelenggaraan Pendidikan demokrasi yang baik juga dapat diukur dari implementasi *softskill* dan IPTEKS, kemampuan bekerjasama dalam kelompok dengan egaliter, *leadership*, keberanian, gigih, dan tabah. Selain itu, kesuksesan pendidikan demokrasi juga dapat diukur melalui penguasaan nilai-nilai IPTEKS dan soft skill, yaitu kemampuan bekerja kelompok secara egalitarian, memimpin demokrasi, kemampuan berkoordinasi, rasa percaya diri, tabah, gigih, dan mempunyai nasionalisme tinggi demi mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis (Sofian, Kedaulatan rakyat, 19 Agustus 2005).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu disebabkan oleh salah satu faktor yaitu kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Tingkat partisipasi dalam pemilu yang rendah (golongan putih) dapat mempengaruhi esensi demokrasi. Pendidikan demokrasi memiliki tujuan untuk membentuk warga negara yang menerapkan demokratisasi. Hal tersebut merujuk pada masyarakat yang menghargai, memahami, dan mengimplementasikan nilai demokrasi. Pendidikan demokrasi juga berfungsi untuk membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat sebagai warga negara dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan nasional.

Internalisasi nilai demokrasi merupakan esensi dari pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi merupakan upaya sistemik dan komprehensif untuk memberikan fasilitas pendidikan politik kepada warga negara untuk memahami, melaksanakan, dan mengembangkan nilai, konsep, dan prinsip demokrasi berdasarkan kedudukan dan perannya dalam bermasyarakat.

Saran

Golput atau golongan putih seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah sebagai penyelenggara pemilu dan partai politik. Program kerja seperti sosialisasi kepada masyarakat untuk penguatan demokrasi harus di tingkatkan. Terutama bagi wilayah yang memiliki tingkat dan kesadaran demokrasi rendah dan juga pemerintah juga harus memberi contoh yang baik untuk rakyatnya. Selain itu, penerapan Pendidikan demokrasi di kalangan masyarakat merupakan salah satu upaya terbaik dalam meningkatkan partisipasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4, 329-348.
- Asmaul Husna, Y. F. (2021). Pendidikan Politik : Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilihnya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: darma bakti Teuku Umar*, 85-100.
- Elfitri M., dan Suryanef. (2012). Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat oleh Relawan Demokrasi Basis Warganet pada Pemilu Serentak 2019 di Kota Padang. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 39-47.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Humanika*, 33-54.
- Faizuabdi, M. (2021). Konsep Dasar Data, Informasi, Pengetahuan. 9-30.
- Firda Puspa, R. R. (t.thn.). Demokrasi Pendidikan.
- Inilah 3 Penyebab Rendahnya Partisipasi Politik.* (2012). [Inilah 3 Penyebab Rendahnya Partisipasi Politik | Republika Online](#)
- Kartoni. (2022). Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 1-19.
- Kusrahmadi, S. (t.thn.). Pentingnya Pendidikan Demokrasi Dalam Mewujudkan Masyarakat Sipil (Civil Society). 1-19.
- Lampiran UU RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Liando, D. M. (2016). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 14-28.
- Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia.* (2021). <https://www.uii.ac.id/meningkatkan-partisipasi-politik-masyarakat-indonesia/>
- Muhammad Sobri, U. (2022). Implementasi Pendidikan Demokrasi di Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 6174-6181.

Pengertian Pemilu. (2022). <https://kota-tangerang.kpu.go.id/page/read/37/pengertian-pemilu#:~:text=Pemilu%20adalah%20sarana%20pelaksanaan%20kedaulatan, Dasar%20Negara%20Republik%20Indonesia%201945>

Pusposari, D. (t.thn.). Pendidikan Yang Demokratis Dalam Era Global. *Bahasa Dan Sastra Indonesia Dalam Konteks Global*, 83-98.

Rizki Ramdani, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan DEWANTARA*, 9034-9038.

Sundari, F. W. (2017). Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pelalawan Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2015. *JOM FISIP*, 1-15.

Tarigan, S. A. (t.thn.). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik*.

Warsudin, D. (2016). Optimalisasi KKPU Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu. *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, 1995-2030.